

**STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PENANGGULANGAN ANAK
JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Ary Julian Syaputra
NPP. 29.0450

*Asdaf Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: aryjuliansyaputra0@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on the problem of the presence of street children in public facilities that can cause chaos, disorder and disrupt the beauty of urban planning. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and describe the Strategy for the Implementation of Guidance for Handling Street Children at the Social Service of Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province and to find out what are the inhibiting factors and efforts of the government in overcoming them. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the SWOT analysis theory according to Rangkuti. Data collection techniques using in-depth interviews (9 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** There is no budget allocation that is a priority so that there are still many neglected street children and the existing street children data is not accurate. **Conclusion:** That there are internal factors such as the suitability of the vision and mission of the Pangkalpinang City government, clear legal basis, good human resources competence, commitment of all personnel in the field of social rehabilitation, adequate facilities and infrastructure and external factors, namely the potential and sources of social welfare, support political policies from regional heads, opportunities for collaboration with private partners or business entities, development of social media as a means of interaction, widespread migration of people with minimal skills, low community economy, neighborhood friendships with street children, and unformed social organizations/communities.

Keywords: Coaching, SWOT Analysis, Strategy, Street Children

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan banyaknya kehadiran dari anak jalanan pada fasilitas publik dapat menimbulkan kesemrawutan, ketidaktertiban dan mengganggu keindahan tata kota. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengetahui apa saja faktor penghambat dan upaya dari pemerintah dalam mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan

analisis terhadap teori analisis SWOT menurut Rangkuti. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (9 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Belum adanya alokasi anggaran yang menjadi prioritas sehingga masih banyak anak jalanan yang terlantar dan data anak jalanan yang ada belum akurat. **Kesimpulan:** Bahwa terdapat faktor internal seperti kesesuaian visi dan misi pemerintah Kota Pangkalpinang, dasar hukum yang jelas, kompetensi sdm yang baik, komitmen seluruh personel bidang rehabilitasi sosial, sarana dan prasarana yang cukup memadai dan Faktor eksternal yaitu adanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dukungan kebijakan politik dari kepala daerah, peluang kerja sama dengan mitra swasta atau badan usaha, perkembangan media sosial sebagai sarana interaksi, maraknya migrasi penduduk minim ketrampilan, perekonomian masyarakat yang rendah, lingkungan pertemanan anak jalanan, dan lsm/komunitas sosial yang belum terbentuk.

Kata Kunci: Pembinaan, Analisis SWOT, Strategi, Anak Jalanan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan anak jalanan telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menyelesaikannya. Hal ini ditandai dengan berbagai program dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Fenomena anak jalanan identik dengan kota-kota besar yang ada diseluruh Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya anak jalanan di Indonesia. Berdasarkan jurnal DPR RI yang ditulis oleh Herlina Asri (2014) mengatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah memicu terjadinya permasalahan sosial khususnya peningkatan anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi tidak mempunyai suatu individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau keluarga menjadi masalah kompleks yang harus dihadapi mereka. Pada tingkatan keluarga, kemiskinan akan berpotensi menurunkan paradigma kemiskinan terhadap anak-anaknya. Anak-anak akan berpikir bahwa di masa depan mereka hanya akan melanjutkan takdir orang tua. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan bagi anak-anak dalam menggapai cita-cita harus sirna karena orang tua yang tidak memiliki biaya.

Anak jalanan dan gelandangan pengemis pada mulanya berasal dari keluarga yang miskin secara materi yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itulah membuat mereka memilih menjadi anak jalanan dengan harapan dapat menghasilkan uang tanpa harus memiliki kompetensi sebagaimana profesi lainnya. Hal ini didukung oleh penelitian Tateki dkk (2009) yang meneliti alasan para responden menjadi anak jalanan. Beberapa diantara jawaban yang diajukan yakni : 1) tidak memiliki kemampuan dalam bekerja, 2) tidak memiliki modal untuk membuka usaha, 3) tidak memiliki keterampilan kerja, 4) tidak memiliki pilihan lain, dan 5) lebih cenderung suka menjadi gepeng. Berdasarkan jawaban dari para responden didapatkan alasan nomor empat menjadi alasan yang paling dominan. Anak jalanan dan gelandangan yang muncul di kota-kota besar selain disebabkan oleh kemiskinan, banyak diantaranya juga disebabkan oleh adanya pergeseran penduduk suatu desa dengan tujuan mencari penghidupan yang layak di kota. Kehadiran dari anak jalanan pada fasilitas publik dapat menimbulkan kesemrawutan, ketidaktertiban dan mengganggu keindahan tata kota. Anak jalanan biasanya menghabiskan waktu lebih dari 8 jam perhari hingga 11 jam perhari dengan

mengikuti waktu masyarakat beraktivitas di tempat ramai seperti alun-alun kota. Aktivitas yang dilakukan mereka adalah mengamen, mengelap kaca mobil, duduk pada jalur pejalan kaki dan sebagainya membuat masyarakat yang sedang melakukan aktivitasnya akan terganggu.

Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab baik terhadap ketentraman dan ketertiban umum maupun terhadap jaminan hidup yang layak bagi anak gelandangan. Penanganan masalah anak jalanan ini telah diatur pada pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dimana disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kota Pangkalpinang merupakan kota yang terklasifikasi sebagai kota besar. Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kota Pangkalpinang pada tahun 2020 mencapai 216 ribu jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 111 ribu jiwa dan jumlah perempuan sebesar 105 ribu jiwa. Sebagai Ibukota Bangka Belitung dan pusat perekonomian, masalah mengenai anak jalanan dan gelandangan pengemis bukan sesuatu hal yang tidak mungkin masih ada. Melalui peraturan daerah no 7 tahun 2015 tentang anak jalanan dan pengemis serta deklarasi kota bebas gelandangan dan pengemis oleh Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa maka kota ini bisa dijadikan sebagai model percontohan secara nasional. Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi pada bidang sosial menjadi SKPD yang mempunyai peran lebih dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Pangkalpinang dalam menangani masalah anak jalanan. Berdasarkan pasal 3 peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 7 tahun 2015 disebutkan bahwa dalam melakukan penanganan masalah anak jalanan di kota pangkalpinang dilakukan melalui 4 (empat) upaya yaitu : pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kehadiran dari anak jalanan pada fasilitas publik dapat menimbulkan kesemrawutan, ketidaktertiban dan mengganggu keindahan tata kota. Anak jalanan biasanya menghabiskan waktu lebih dari 8 jam sehari hingga 11 jam sehari dengan mengikuti waktu masyarakat beraktivitas di tempat ramai seperti alun-alun kota. Aktivitas yang dilakukan mereka adalah mengamen, mengelap kaca mobil, duduk pada jalur pejalan kaki dan sebagainya membuat masyarakat yang sedang melakukan aktivitasnya akan terganggu.

Namun setelah diterapkannya program ini Berdasarkan Data yang diperoleh penulis dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang berupa nama-nama anak jalanan yang terjaring razia patroli sosial, sekitar 11 dari 44 anak pada tahun 2019-2020 terjaring razia kembali atau kedua kalinya setelah adanya pengembalian kepada orang tua. Hal menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial belum berdampak signifikan dan penulis merasa perlu merumuskan suatu strategi untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap anak jalanan yang ada di Kota Pangkalpinang agar masalah anak jalanan tidak berkembang semakin pesat seiring dengan pembangunan Kota Pangkalpinang itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaludin dalam artikel yang diterbitkan bangkapos pada Senin, 3 Agustus 2020 mengatakan keberadaan pengamen anak di jalanan lampu merah kota Pangkalpinang yang semakin masif perlu peran dan gerak cepat semua pihak dalam atasi hal itu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian Sari Setyaningsih berjudul *Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang*, menemukan bahwasannya menunjukkan strategi yang paling strategi yaitu S-O atau kekuatan dan peluang dengan memanfaatkan peluang dan menggunakan kekuatan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Yoga Purnama, Zainal Hidayat, Rihandoyo yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya bahwa isu yang paling strategis yang dihasilkan dari *litmus test* yaitu pengusulan pembuatan peraturan daerah yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan.

Penelitian berikutnya yaitu Rohman dan Susmito yang berjudul *Manajemen Strategis SKPD Dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Terbaik Dinas Sosial Kabupaten Malang*, yang berkesimpulan bahwasannya bahwa tahapan-tahapan dalam proses manajemen strategi menghasilkan dampak dalam pelayanan yaitu adanya kepuasan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang penulis teliti yaitu anak jalanan, selain itu lokasi penelitian yang dilakukan pada Kota Pangkalpinang. Berbeda dari Sari Setyaningsih, Yoga Purnama dan Zainal Hidayat dan Rihandoyo, Rohman dan Susmito. Selain itu penelitian ini memiliki berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Pangkalpinang dalam menangani masalah anak jalanan. Berdasarkan pasal 3 peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 7 tahun 2015 disebutkan bahwa dalam melakukan penanganan masalah anak jalanan di kota pangkalpinang dilakukan melalui 4 (empat) upaya yaitu : pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Tujuan dari penanganan anak jalanan ini secara garis besar yaitu untuk mencegah dan mengatasi peningkatan jumlah anak jalanan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat dan bagi anak jalanan terpenuhinya hak-hak dasar baik oleh pemerintah maupun peran dari masyarakat yang berpartisipasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengetahui apa saja faktor penghambat dan upaya dari pemerintah dalam mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, Pekerja Sosial Masyarakat dan Anak Jalanan (sebanyak 5 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan analisis SWOT dari Rangkuti. Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur strategi yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Hambatan. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Kekuatan

Berkaitan dengan permasalahan anak jalanan di Kota Pangkalpinang, program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu rehabilitasi sosial anak jalanan yang dilakukan melalui beberapa rangkaian. Pertama, Dinas Sosial melalui para pekerja sosial mengadakan patroli ditempat-tempat umum yang berpotensi menjadi kegiatan para anak jalanan. Anak Jalanan yang terjaring razia kemudian dilakukan assesmen atau proses menggali informasi dari anak jalanan yang berkaitan dengan alasan menjadi anak jalanan, tempat tinggal, keluarga dan segala yang berkaitan dengan kebutuhan tim pekerja sosial. Assesmen dilakukan di rumah perlindungan sosial (RPS) dengan maksimal 7 hari atau satu minggu sebelum kemudian mereka dikembalikan kepada orang tua atau keluarga terdekat. Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pembinaan anak jalanan mengacu pada peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Pangkalpinang dimana telah diatur ruang lingkup penanganan anak jalanan yang meliputi dalam 5 upaya yaitu : pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial anak jalanan. Adanya regulasi berupa peraturan daerah ini, Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya serta adanya pengaturan mengenai sumber anggaran yang berasal dari APBD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi setelah adanya peraturan daerah lebih berjalan mengingat biaya dalam penanganan ini tidak sedikit. Selain itu Sumber daya aparatur atau SDM yang ada pada bidang ini memiliki kompetensi yang sesuai dimana para kepala seksi menduduki jabatan sesuai dengan dasar keilmuannya. Pada jabatan kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lansia merupakan lulusan sarjana dan magister sosial, kepala seksi rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas merupakan lulusan sarjana kesehatan masyarakat dan kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan napza merupakan lulusan vokasi yang telah berpengalaman lama dalam bidang sosial. Kemudian anggota seksi diisi rata-rata oleh lulusan sarjana dengan keilmuannya yang berbeda sehingga adanya kolaborasi yang tepat dalam melaksanakan tupoksi pada seksinya masing-masing.

3.2 Kelemahan

Minimnya anggaran dalam penanganan anak jalanan membuat ruang gerak Dinas Sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial sangat sempit. Penyelenggaraan penanggulangan anak jalanan hanya sebatas penanganan sementara yaitu melalui kegiatan patroli, assesmen dan belum sampai pada

pembinaan dan pemenuhan kebutuhan bagi anak jalanan secara berkelanjutan. Berdasarkan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021, anggaran untuk penanganan anak jalanan hanya berjumlah Rp46.222.000 dengan target atau sasaran sebanyak 288 orang yang terbagi atas gelandangan, pengemis, dan orang lanjut usia. Kondisi ini mengakibatkan pemenuhan kebutuhan bagi anak jalanan tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang telah diatur melalui peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 dimana disebutkan upaya pemenuhan kebutuhan yaitu : pemenuhan hak identitas, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan tempat tinggal, pemenuhan hak atas kesehatan, pemenuhan hak atas pendidikan dan pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum. Selanjutnya Sebagai Penjangkauan anak jalanan berkaitan dengan program pemenuhan kebutuhan, yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yaitu data mengenai anak jalanan yang belum akurat artinya data yang disediakan oleh Dinas Sosial belum sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Berdasarkan observasi penulis dilapangan, banyak anak jalanan yang belum terdata atau dengan kata lain belum terjaring razia oleh Dinas Sosial. Permasalahan anak jalanan bukan hanya soal menghilangkan angka anak jalanan sendiri akan tetapi bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar dari anak jalanan itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan secara hukum, dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ini harus diselenggarakan secara bersama-sama dan saling melengkapi antar OPD yang terkait. Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan melalui kerja dengan program yang ada di Dinas Pendidikan. Pemenuhan kebutuhan kesehatan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

3.3 Peluang

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau disingkat. PSKS merupakan individual, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan di Kota Pangkalpinang salah satunya adalah pekerja sosial masyarakat. Mereka memiliki peran sebagai mitra Dinas Sosial untuk menyelenggarakan fungsi kesejahteraan sosial baik seperti penyaluran bantuan sosial, pendamping bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial serta pengembangan kegiatan sosial lainnya. Penyelenggan Penanganan Anak Jalan yang ada di Kota Pangkalpinang tak lepas dari dukungan Kepala Daerah melalui Kebijakan yang dikeluarkan. Walikota Pangkalpinang sebagai Pembuat kebijakan tertinggi di tingkat Kota mendukung terselenggaranya penanganan anak jalanan yang ada di Kota Pangkalpinang. Selanjutnya Membangun suatu kerja sama dengan pihak swasta atau badan usaha dapat menciptakan pemecahan masalah terkait penyelenggaraan penanganan anak jalanan. Keterbatasan yang ada pada Dinas Sosial harapannya dapat dibantu melalui kerja sama dengan perjanjian seperti kolaborasi dalam penyediaan teknologi, fasilitas penunjang bagi anak jalanan dan lainnya. Selain itu Perkembangan media sosial yang pesat di era sekarang memberi tuntutan bagi setiap orang, kelompok maupun Instansi Pemerintah untuk berinteraksi secara virtual sehingga munculnya hubungan emosional yang dapat dirasakan. Berdasarkan data dari Data Portal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6 persen dari tahun 2021. Pemanfaatan media sosial dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penanganan anak jalanan yang ada di Kota Pangkalpinang.

3.4 Ancaman

Perkembangan Pembangunan Kota Pangkalpinang yang semakin hari semakin maju membuat Kota Pangkalpinang menjadi perhatian masyarakat luar untuk datang dan mencari penghidupan yang baru dari kehidupan sebelumnya dengan harapan di tempat tinggal baru akan memberi kehidupan yang lebih baik. Mereka datang bersama istri serta anak mereka, akan tetapi banyak diantara orang tua yang belum memiliki ketrampilan yang dibutuhkan dalam bekerja, hal ini membuat mereka semakin susah untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Permasalahan ekonomi sering kali menimbulkan efek domino terhadap masalah lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kondisi anak jalanan juga dipengaruhi oleh perekonomian keluarga yang rendah sehingga banyaknya anak yang putus sekolah memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi di jalanan. Selain itu Lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang baik ataupun buruk. Fenomena munculnya anak jalanan baru sering dipengaruhi oleh ajakan teman yang ada dilingkungannya. Mereka terpengaruh karena melihat teman seusianya bisa mendapatkan uang hanya dengan mengamen di jalanan. Selanjutnya Lembaga Sosial Masyarakat atau komunitas Sosial yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan atau membina masyarakat yang dimaksud. Kegiatan sosial berkaitan dengan pembinaan anak jalanan yang dilakukan secara sukarela memberi ruang bagi anak jalanan untuk menggali lebih dalam mengenai pengetahuan, ketrampilan dan lainnya dari para anggota Komunitas atau LSM karena waktu yang diluangkan oleh Komunitas Sosial akan lebih intensif. Dinas Sosial telah memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang digitalisasi yang cukup baik, dengan adanya perangkat komputer yang berjumlah 33 buah dan terintegrasi dengan jaringan internet seharusnya menjadikan Dinas Sosial memiliki layanan akses data digital secara baik. Adanya akses secara digital memungkinkan penjangkauan anak jalanan lebih tepat dan cepat. Kondisi teknologi yang ada pada Dinas Sosial belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat ketika penulis mencoba mengakses website Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dimana berita yang ditampilkan belum aktual. Kemudian layanan call center masih berbasis Whatsapp yang memiliki kekurangan terbatasnya perangkat dalam mengakses whatsapp tersebut, ini berpeluang dalam lambatnya respon dari laporan menggunakan whatsapp tersebut.

3.5 Matriks SWOT

Tabel 1.
Matriks SWOT

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan (<i>Strenght</i>)</p>	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p>
	<p>a. Kesesuaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang</p> <p>b. Dasar Hukum yang jelas</p> <p>c. Kompetensi SDM yang baik</p> <p>d. Komitmen Seluruh Personel Bidang Rehabilitasi Sosial</p> <p>e. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai</p>	<p>a. Belum Menjadi Prioritas Alokasi Anggaran</p> <p>b. Data Anak Jalanan yang belum akurat</p> <p>c. Integrasi antar OPD Belum Optimal</p>
<p>Peluang (<i>Opportunities</i>)</p>	<p>Strategi S-O</p>	<p>Strategi W-O</p>
<p>a. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</p> <p>b. Dukungan Kebijakan Politik dari Kepala Daerah</p> <p>c. Peluang Kerja Sama dengan Mitra Swasta atau Badan Usaha</p> <p>d. Perkembangan Media Sosial Sebagai Sarana Interaksi</p>	<p>1.Mengoptimalkan peran dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Pangkalpinang melalui koordinasi yang itensif</p> <p>2. Pemanfaatan media sosial melalui pembuatan video dan foto guna menstimulasi partisipasi masyarakat</p>	<p>1.Meningkatkan Koordinasi antar OPD yang terkait untuk berkomitmen dalam Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan</p> <p>2.Menyusun program kolaborasi bersama mitra swasta dalam rangka penyelenggaraan pembinaan anak jalanan</p> <p>3.Meningkatkan Pendataan Anak Jalanan berbasis Digital yang terintegrasi dengan OPD terkait serta PSKS</p>

Tantangan (<i>Threat</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
a. Maraknya Migrasi Penduduk Minim Ketrampilan b. Perekonomian Masyarakat yang Rendah c. Lingkungan Pertemanan Anak Jalanan d. LSM/Komunitas Sosial yang Belum Terbentuk	1.Mendorong pembentukan Komunitas Sosial yang berfokus pada pembinaan anak jalanan 2.Peningkatan pelayanan dasar melalui bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan atau rumah tangga sasaran	1. Pengalihan anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk program berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan anak jalanan 2. Mengoptimalkan proses penyusunan rencana program, penganggaran, maupun evaluasi anggaran

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terdapat faktor internal seperti kesesuaian visi dan misi pemerintah kota pangkalpinang, dasar hukum yang jelas, kompetensi sdm yang baik, komitmen seluruh personel bidang rehabilitasi sosial , sarana dan prasarana yang cukup memadai dan Faktor eksternal yaitu adanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dukungan kebijakan politik dari kepala daerah, peluang kerja sama dengan mitra swasta atau badan usaha, perkembangan media sosial sebagai sarana interaksi, maraknya migrasi penduduk minim ketrampilan, perekonomian masyarakat yang rendah, lingkungan pertemanan anak jalanan, dan lsm/komunitas sosial yang belum terbentuk. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pembinaan anak jalanan di Kota Pangkalpinang menjadi analisis untuk menemukan strategi bahwa akan lebih baik jika Dinas Sosial mendorong pembentukan komunitas sosial yang berfokus pada pembinaan anak jalanan, menyusun program kolaborasi dengan mitra swasta, melakukan pendataan anak jalanan berbasis digital dan memanfaatkan media sosial untuk menstimulasi partisipasi masyarakat.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Sari Setyaningsih (Sari Setyaningsih, 2018), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu Proses kerja sama antara Dinas Sosial dengan OPD yang berkaitan dalam penanganan anak jalanan telah dilaksanakan akan tetapi dirasa belum optimal karena anak-anak yang terjaring razia tidak berikan pembinaan berkelanjutan sehingga pemenuhan akan kebutuhan anak jalanan belum sepenuhnya didapatkan.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Yoga Purnama dan Zainal Hidayat dan Rihandoyo (Yoga Purnama & Zainal Hidayat & Rihandoyo, 2013) dimana hasil dari litmus test yaitu pengusulan pembuatan peraturan daerah yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan sedangkan penelitian yang penulis buat melakukan strategi dengan pembentukan Komuntas Sosial yang berfokus pada pembinaan anak jalanan.

Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu minimnya anggaran dalam penanganan anak jalanan membuat ruang gerak Dinas Sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial sangat sempit seperti temuan Rohman dan Susmito (Rohman & Susmito, 2016).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini yaitu Perkembangan Pembangunan Kota Pangkalpinang yang semakin hari semakin maju membuat Kota Pangkalpinang menjadi perhatian masyarakat luar untuk datang dan mencari penghidupan yang baru dari kehidupan sebelumnya dengan harapan di tempat tinggal baru akan memberi kehidupan yang lebih baik. Mereka datang bersama istri serta anak mereka, akan tetapi banyak diantara orang tua yang belum memiliki ketrampilan yang dibutuhkan dalam bekerja, hal ini membuat mereka semakin susah untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan lebih cenderung mengamen karena pekerjaan ini tidak membutuhkan ketrampilan. Selain itu Lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang baik ataupun buruk. Fenomena munculnya anak jalanan baru sering dipengaruhi oleh ajakan teman yang ada dilingkungannya. Mereka terpengaruh karena melihat teman seusianya bisa mendapatkan uang hanya dengan mengamen di jalanan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat faktor internal seperti kesesuaian visi dan misi pemerintah Kota Pangkalpinang, dasar hukum yang jelas, kompetensi sdm yang baik, komitmen seluruh personel bidang rehabilitasi sosial, sarana dan prasarana yang cukup memadai dan Faktor eksternal yaitu adanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dukungan kebijakan politik dari kepala daerah, peluang kerja sama dengan mitra swasta atau badan usaha, perkembangan media sosial sebagai sarana interaksi, maraknya migrasi penduduk minim ketrampilan, perekonomian masyarakat yang rendah, lingkungan pertemanan anak jalanan, dan lsm/komunitas sosial yang belum terbentuk.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Rangkuti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad (2020) *Manajemen Strategis*. Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka.
- Nazarudin (2020) *Manajemen Strategik*. Palembang: CV. Amanah.
- Novianto, E. (2019) *Manajemen Strategis*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Nur'aini, F. dan D. F. (2020) *Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman, Anak Hebat Indonesia*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Riyanto, S., M. N. L. A. dan A. R. P. (2021) *Analisis SWOT Sebagai Penyusun Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yam, J. H. (2020) *Manajemen Strategi Konsep dan Implementasi*. Kedua. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Haris, Andi Tenri Citra. *Solidaritas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan*. Penerbit Leutikaprio, 2020.
- Faroh, F. (2019) “Peran Fatayat Nu Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan (Studi Di Desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Uin Raden Intan Lampung.
- Mudatsir, M. (2020) “Analisis Swot Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Guna Meningkatkan Daya Saing Pada Cafe Mr. Yess Coffee Di Kota Benteng Selayar”. Universitas Negeri Makassar.
- Nisak, Z. (2013) ‘Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif’, *Jurnal Ekbis*, 9(2), Pp. 468–476.
- Purnama, Y., Hidayat, Z. and Rihandoyo, R. (2013) “Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang”, *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), pp. 161–170.
- Budio, S. B. S. (2019) ‘Strategi Manajemen Sekolah’, *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), pp. 56–72.